

PENENTUAN SEKTOR UNGGULAN DAERAH UNTUK MENGURANGI KETIMPANGAN PENDAPATAN WILAYAH DI EKS KARISIDENAN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR

Fendri Hisbullah Febrianto, Eko Budi Santoso
Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota FTSPK ITS, Surabaya
Email korespondensi : eko_budi@urplan.its.ac.id

ABSTRAK

Salah satu permasalahan dalam pembangunan wilayah adalah ketimpangan pendapatan wilayah. Dalam mengatasi permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan mengukur ketimpangan pendapatan wilayah dan menentukan sektor unggulan daerah yang dapat menjadi penggerak utama bagi sektor lain pada kegiatan perekonomian wilayah, sehingga hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan pemerintah (khususnya pemerintah daerah) dalam menentukan arah kebijakan pengembangan dan pembangunan daerah untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur ketimpangan pendapatan wilayah dan menentukan sektor unggulan di Wilayah Eks Karisidenan Madiun. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan analisis Indeks Williamson untuk mengukur ketimpangan pendapatan wilayah serta *Static Location Quotient* dan *Dynamic Location Quotient* untuk menentukan sektor unggulan daerah. Hasil analisa menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan Wilayah Eks Karisidenan Madiun dipengaruhi oleh tingginya pendapatan per kapita Kota Madiun dan rendahnya pendapatan per kapita Kabupaten Madiun, Magetan, Ngawi, Pacitan, dan Ponorogo. Selain itu, dari hasil penelitian ini sektor industri pengolahan serta sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan merupakan sektor unggulan yang berpengaruh besar dalam pembentukan PDRB di sebagian besar kabupaten/kota di Wilayah Eks Karisidenan Madiun. Untuk mengurangi ketimpangan pendapatan rekomendasi perlunya pemerataan pembangunan wilayah khususnya pada pembangunan ekonomi dan investasi serta pengembangan sektor unggulan dalam pembangunan daerah merupakan salah satu strategi yang efektif untuk mendorong pertumbuhan wilayah Eks Karisidenan Madiun.

Kata kunci: Ketimpangan Pendapatan Wilayah, Sektor Unggulan, Eks Karisidenan Madiun

PENDAHULUAN

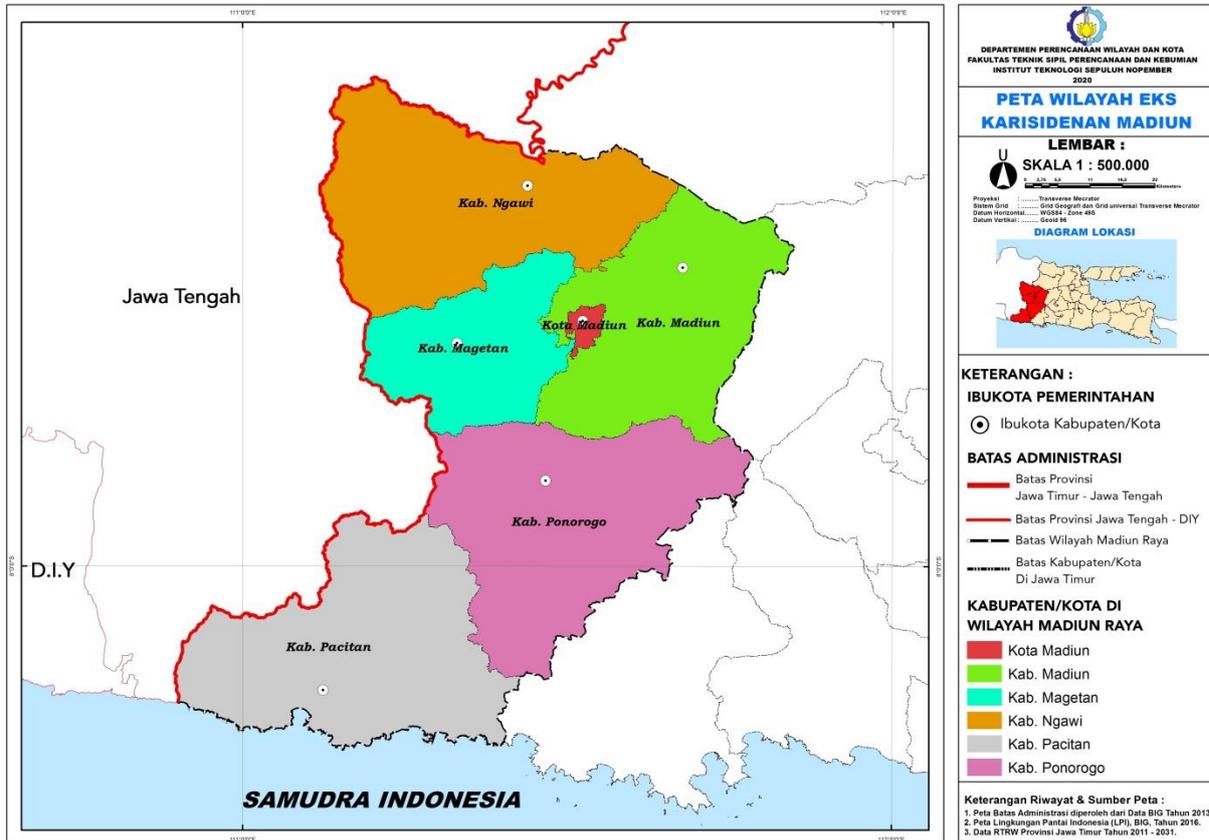
Ketimpangan pembangunan ekonomi merupakan peristiwa umum yang terjadi dalam proses pembangunan ekonomi suatu daerah (Sjafrizal, 2012). Distribusi atau persebaran pembangunan ekonomi yang kurang merata menyebabkan berbagai masalah, dari segi ekonomi, budaya, dan sosial. Sehingga banyak negara memiliki arah kebijakan untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antar wilayah (Todaro dan Smith, 2009).

Dalam mengatasi ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah dapat dilakukan dengan pemetaan sektor-sektor ekonomi yang bersifat potensial untuk mengatasi permasalahan ketimpangan pembangunan antarwilayah (Miranti et al, 2013). Selain itu, pemberdayaan sektor unggulan pada tiap daerah dapat dilakukan melalui penciptaan peluang investasi sehingga dapat mengatasi permasalahan-permasalahan ekonomi (Rachbini, 2001). Sektor unggulan memiliki peran untuk mendorong perkembangan bagi sektor-sektor lainnya, baik sektor yang memiliki peran untuk mensuplai *input*nya atau sektor yang berperan dalam memanfaatkan *output*nya sebagai *input* dalam proses produksi (Widodo, 2006).

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan dalam mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah dapat dilakukan melalui pemetaan sektor-sektor unggulan pada masing-masing daerah.

Provinsi Jawa Timur merupakan daerah yang memiliki PDRB tertinggi kedua di Indonesia dan sekaligus menjadi penyumbang kedua terbesar dalam pembentukan PDB Indonesia (BPS Jawa Timur, 2019). Namun pemerataan pembangunan di setiap daerah di Provinsi Jawa Timur masih belum maksimal (Satria et al, 2018). Hal ini dapat dilihat dari

kontribusi tiap wilayah di Jawa Timur dalam pembentukan PDRB Jawa Timur, berdasarkan BPS Jawa Timur pada Tahun 2019 kontribusi pembentukan PDRB Jawa Timur didominasi dengan Kawasan Gerbangkertosusilo Plus (62,64%) dan Malang Raya (8,13%), sisanya merupakan kontribusi dari wilayah lainnya. Wilayah Eks Karisidenan Madiun merupakan wilayah yang terletak di bagian barat Provinsi Jawa Timur (berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah).



Gambar 1 Peta Wilayah Eks Karisidenan Madiun
Sumber : Penulis, 2021

Eks Karisidenan Madiun merupakan salah satu wilayah dengan kontribusi PDRB yang rendah, yaitu sebesar 4,6% terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur (BPS Jawa Timur, 2019). Selain itu pertumbuhan ekonomi di tiap kabupaten Eks Karisidenan Madiun berada dibawah rata-rata Jawa Timur, hanya Kota Madiun yang memiliki pertumbuhan diatas rata-rata Jawa Timur/ tergolong tinggi. Selain itu, persebaran PDRB per kapita antar kabupaten/kota masih belum merata (Revisi RTRW Jawa Timur 2011-2031).

Berdasarkan penjelasan diatas, perlu dilakukan pemetaan sektor unggulan daerah untuk mengurangi ketimpangan pendapatan wilayah. Dalam penelitian ini akan berfokus kepada penentuan sektor-sektor unggulan daerah untuk mengurangi ketimpangan pendapatan wilayah Eks Karisidenan Madiun sehingga dapat berpengaruh positif terhadap PDRB Jawa Timur.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dan deskriptif. Pendekatan kuantitatif digunakan dalam menentukan tingkat ketimpangan pendapatan Eks Karisidenan Madiun dan penentuan sektor unggulan daerah, sedangkan pendekatan deskriptif digunakan dalam mendeskripsikan/interpretasi hasil analisis kuantitatif yang telah dilakukan. Dalam

penelitian ini terdapat 2 tahap analisis yaitu (1) mengukur tingkat ketimpangan pendapatan daerah menggunakan Indeks Williamson, (2) menentukan sektor unggulan daerah menggunakan analisis *Static Location Quotient* (SLQ) dan *Dynamic Location Quotient* (DLQ) dan dilanjutkan dengan tipologi kelas sesuai hasil Analisis SLQ dan DLQ. Dalam penelitian ini ketimpangan pendapatan yang dimaksud adalah ketimpangan pendapatan wilayah (PDRB Atas Dasar Harga Konstan) Eks Karisidenan Madiun, sedangkan sektor yang difokuskan dalam penelitian ini adalah sektor-sektor yang memiliki potensi untuk menjadi sektor *prime mover* (penggerak utama) bagi sektor lainnya, sektor tersebut terdiri dari Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ; Sektor Pertambangan dan Penggalian ; Sektor Industri Pengolahan ; dan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Indeks Williamson

Untuk mengukur tingkat kesenjangan/ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Eks Karisidenan Madiun digunakan *Williamson Index*/Indeks Williamson. Indeks Williamson digunakan untuk mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah dengan menitikberatkan pada perbandingan pendapatan wilayah (PDRB) (Sjafrizal, 2012 : 110). Berikut formula Indeks Williamson dengan menggunakan data dasar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per kapita. Berdasarkan Sjafrizal (2012) :

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - y)^2 (f_i/n)}}{y} \quad 0 < V_w < 1$$

Keterangan :

- V_w = Indeks Williamson
- y_i = PDRB per kapita daerah i
- y = PDRB per kapita rata-rata seluruh daerah
- f_i = Jumlah penduduk daerah i
- n = Jumlah penduduk seluruh daerah

Dalam hasil perhitungan Indeks Williamson dapat dikategorikan sebagai berikut :

- < 0,3 = Ketidakmerataan Rendah
- 0,3 – 0,7 = Ketidakmerataan Sedang
- > 0,7 = Ketidakmerataan Tinggi

Static Location Quotient (SLQ) dan *Dynamic Location Quotient* (DLQ)

Untuk menentukan sektor unggulan daerah digunakan Analisis *Static Location Quotient* (SLQ) dan *Dynamic Location Quotient* (DLQ). Analisis ini bertujuan untuk mengetahui keunggulan komparatif suatu sektor. Menurut Kuncoro (2018) berikut formulasi SLQ dan DLQ :

$$SLQ = \frac{x_i / \sum x_i}{X_i / \sum X_i}$$

Keterangan:

- SLQ = Nilai *Location Quotient* (LQ) Statis
- x_i = Nilai tambah/PDRB sektor i di suatu daerah
- X_i = Nilai tambah/Produk bruto sektor i daerah referensi
- $\sum x_i$ = Produk domestik regional bruto daerah i
- $\sum X_i$ = Produk bruto daerah referensi

- $SLQ = 1$; Laju pertumbuhan sektor i daerah sama dibandingkan sektor yang sama di daerah referensi.
- $SLQ > 1$; Laju pertumbuhan sektor i daerah lebih besar dibandingkan sektor yang sama di daerah referensi.
- $SLQ < 1$; Laju pertumbuhan sektor i daerah lebih kecil dibandingkan sektor yang sama di daerah referensi.

$$DLQ = \left[\frac{(1+g_i)/(1+g)}{(1+G_i)/(1+G)} \right]^t$$

Keterangan:

DLQ = Nilai *Location Quotient* (LQ) Dinamis

g_i = Laju pertumbuhan nilai tambah sektor i di suatu daerah

g = Rata-rata laju pertumbuhan nilai tambah seluruh sektor di suatu daerah

G_i = Laju pertumbuhan nilai tambah sektor i Pada daerah referensi

G = Rata-rata laju pertumbuhan nilai tambah seluruh sektor daerah referensi

t = Selisih tahun akhir dan tahun awal

- $DLQ > 1$; Potensi perkembangan sektor i daerah lebih cepat dibandingkan sektor yang sama di daerah referensi.
- $DLQ < 1$; Potensi perkembangan sektor i daerah lebih rendah dibandingkan sektor yang sama di daerah referensi.

Setelah diketahui hasil Analisis *Static Location Quotient* (SLQ) dan *Dynamic Location Quotient* (DLQ) maka digunakan Tipologi Klasen yaitu dengan mengkombinasi hasil analisis SLQ dan DLQ dengan tabel tipologi klasen menurut Kuncoro (2009) sebagai berikut :

Tabel 1. Tipologi Klasen SLQ dan DLQ

KRITERIA	SLQ<1	SLQ>1
DLQ>1	Andalan	Unggulan
DLQ<1	Tertinggal	Prospektif

Sumber : Kuncoro, 2009

Berikut interpretasi berdasarkan hasil tipologi klassen diatas menurut Kuncoro (2009), yaitu sebagai berikut :

1. Sektor Andalan (Sektor non basis, memiliki perkembangan yang pesat sehingga sektor tersebut berpeluang menjadi basis ekonomi wilayah pada masa mendatang).
2. Sektor Unggulan (Sektor basis dan sektor yang memiliki perkembangan pesat sehingga dapat menjadi basis ekonomi wilayah pada masa mendatang).
3. Sektor Prospektif (Sektor basis namun, memiliki perkembangan yang menurun sehingga memiliki peluang untuk tidak menjadi basis ekonomi wilayah pada masa mendatang).
4. Sektor Tertinggal (Sektor non basis dan tidak dapat menjadi basis ekonomi wilayah pada masa mendatang).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketimpangan Pendapatan Wilayah Eks Karisidenan Madiun

Dalam menghitung ketimpangan pendapatan Wilayah Eks Karisidenan Madiun digunakan data *time series* Tahun 2015-2020 untuk mengetahui *trend* tingkat ketimpangan pendapatan wilayah. Dalam perhitungan Indeks Williamson Eks Karisidenan Madiun diperlukan perhitungan PDRB per kapita pada tiap kabupaten/kota di Eks Karisidenan Madiun dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2. Tabel PDRB ADHK Per kapita Eks Karisidenan Madiun

Kabupaten/ Kota	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (ADHK Tahun 2010) Per kapita					
	2015	2016	2017	2018	2019*	2020**
Kabupaten Pacitan	21.035,95	23.115,82	24.892,61	27.060,24	28.773,96	26.932,15
Kabupaten Ponorogo	17.196,42	18.898,49	20.336,39	18.874,93	23.524,90	21.608,50
Kabupaten Madiun	20.561,61	22.459,03	24.084,54	25.939,71	27.731,22	25.414,32
Kabupaten Magetan	22.122,85	24.198,86	25.919,66	28.038,29	29.979,35	27.983,72
Kabupaten Ngawi	18.092,26	19.927,67	21.340,41	23.064,84	24.615,98	23.298,36
Kota Madiun	58.240,40	63.688,29	68.778,93	74.307,32	79.703,52	70.548,43

Keterangan :

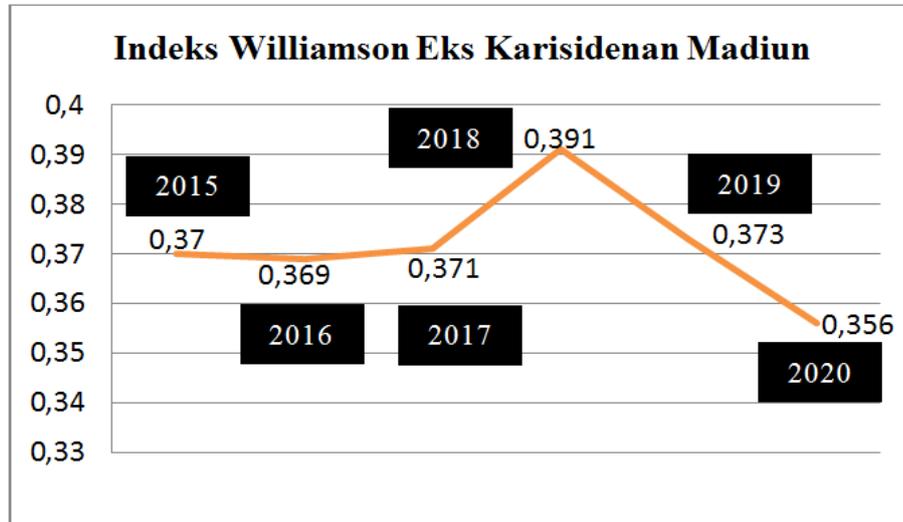
* : PDRB dengan angka Sementara

** : PDRB dengan angka Sangat Sementara

Sumber : Penulis, 2021

Dari Tabel PDRB per kapita diatas dapat diketahui *trend* pertumbuhan PDRB terjadi pada Tahun 2015-2019 sedangkan pada Tahun 2020 seluruh kabupaten/kota serentak mengalami penurunan PDRB ADHK Per kapita. Selain itu, apabila dilihat dari distribusi PDRB ADHK Per kapita terdapat perbedaan signifikan antara PDRB Per kapita Kota Madiun dengan kabupaten lainnya, hal ini menunjukkan secara kesejahteraan menurut PDRB per kapita Kota Madiun lebih sejahtera dibandingkan dengan kabupaten

lainnya. Sehingga perlu adanya upaya peningkatan PDRB per kapita pada tiap kabupaten, salah satunya dapat melalui pengembangan sektor unggulan masing-masing daerah. Setelah mengetahui gambaran PDRB ADHK Per kapita maka dapat diketahui tingkat ketimpangan pendapatan wilayah dengan menggunakan perhitungan Indeks Williamson, dengan hasil sebagai berikut.



Gambar 2 Trend Indeks Williamson Madiun Raya Tahun 2015-2020

Sumber : Penulis, 2021

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan Indeks Williamson di Eks Karisidenan Madiun mengalami penurunan dari Tahun 2015-2016, kemudian mengalami peningkatan dari Tahun 2016-2018, kemudian mengalami penurunan kembali pada Tahun 2019-2020. Hasil perhitungan dan *trend* menunjukkan Indeks Williamson di Eks Madiun Raya tergolong sedang/moderat, artinya pada Wilayah Eks Karisidenan Madiun masih terjadi ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota didalamnya sehingga salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut dengan melalui upaya pemetaan sektor unggulan daerah untuk meningkatkan PDRB per kapita pada tiap kabupaten/kota di Eks Karisidenan Madiun sehingga ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota dapat dikurangi.

2. Sektor Unggulan Daerah Eks Karisidenan Madiun

Berdasarkan hasil perhitungan *Static Location Quotient* (SLQ) didapatkan hasil sebagai berikut.

Tabel 3. Hasil Perhitungan *Static Location Quotient* (SLQ) Eks Karisidenan Madiun

No	Kota/ Kabupaten	Sektor							
		Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		Pertambangan dan Penggalian		Industri Pengolahan		Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	
		SLQ	Intrepetasi	SLQ	Interpretasi	SLQ	Interpretasi	SLQ	Interpretasi
1	Kota Madiun	0,07	Non Basis	0,002	Non Basis	1,46	Basis	2,02	Basis
2	Kabupaten Madiun	2,61	Basis	0,2	Non Basis	0,34	Non Basis	0,88	Non Basis
3	Kabupaten Magetan	2,59	Basis	0,3	Non Basis	0,33	Non Basis	0,83	Non Basis

4	Kabupaten Ngawi	2,88	Basis	0,25	Non Basis	0,28	Non Basis	0,93	Non Basis
5	Kabupaten Pacitan	2,29	Basis	1,16	Basis	0,23	Non Basis	0,94	Non Basis
6	Kabupaten Ponorogo	2,34	Basis	0,46	Non Basis	0,23	Non Basis	0,95	Non Basis

Sumber : Penulis, 2021

Setelah mengetahui hasil *Static Location Quotient* (SLQ) maka selanjutnya melakukan perhitungan *Dynamic Location Quotient* (DLQ) dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 4. Hasil Perhitungan *Dynamic Location Quotient* (DLQ) Eks Karisidenan Madiun

No	Kota/ Kabupaten	Sektor							
		Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		Pertambangan dan Penggalian		Industri Pengolahan		Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	
		DLQ	Intrepetasi	DLQ	Interpretasi	DLQ	Interpretasi	DLQ	Interpretasi
1	Kota Madiun	0,023	Menurun	0,004	Menurun	1,601	Meningkat	0,611	Menurun
2	Kabupaten Madiun	0,43	Menurun	0,02	Menurun	2,84	Meningkat	5,37	Meningkat
3	Kabupaten Magetan	2,28	Meningkat	0,03	Menurun	2,76	Meningkat	5,75	Meningkat
4	Kabupaten Ngawi	19,29	Meningkat	6,88	Meningkat	8,13	Meningkat	34,83	Meningkat
5	Kabupaten Pacitan	5,42	Meningkat	0,23	Menurun	0,68	Menurun	3,78	Meningkat
6	Kabupaten Ponorogo	0,5	Menurun	0,03	Menurun	2,21	Meningkat	5,86	Meningkat

Sumber : Penulis, 2021

Setelah mengetahui hasil perhitungan *Static Location Quotient* (SLQ) dan *Dynamic Location Quotient* (DLQ) maka selanjutnya dilakukan klasifikasi dengan menggunakan Tipologi Klassen berdasarkan hasil perhitungan *Static Location Quotient* (SLQ) dan *Dynamic Location Quotient* (DLQ) sebagai berikut.

Tabel 5. Hasil Pengklasifikasian Sektor di Eks Karisidenan Madiun Berdasarkan Tipologi Klassen

No	Kota/ Kabupaten	Sektor											
		Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan			Pertambangan dan Penggalian			Industri Pengolahan			Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor		
		SLQ	DLQ	Intrepetasi	SLQ	DLQ	Interpretasi	SLQ	DLQ	Interpretasi	SLQ	DLQ	Interpretasi
1	Kota Madiun	0,07	0,02	Tertinggal 1	0,002	0,004	Tertinggal	1,46	1,60	Unggulan	2,02	0,61	Prospektif
2	Kabupaten Madiun	2,61	0,43	Prospektif	0,2	0,02	Tertinggal	0,34	2,84	Andalan	0,88	5,37	Andalan
3	Kabupaten Magetan	2,59	2,28	Unggulan	0,3	0,03	Tertinggal	0,33	2,76	Andalan	0,83	5,75	Andalan
4	Kabupaten Ngawi	2,88	19,2	Unggulan	0,25	6,88	Andalan	0,28	8,13	Andalan	0,93	34,8	Andalan

5	Kabupaten Pacitan	2,29	5,42	Unggulan	1,16	0,23	Prospektif	0,23	0,68	Tertinggal	0,94	3,78	Andalan
6	Kabupaten Ponorogo	2,34	0,5	Prospektif	0,46	0,03	Tertinggal	0,23	2,21	Andalan	0,95	5,86	Andalan

Sumber : Penulis, 2021

Berdasarkan hasil tabel diatas dapat diketahui sektor-sektor yang dapat dikembangkan dan perlu didorong pembangunannya baik secara perkembangan maupun peningkatan iklim investasi untuk mengurangi ketimpangan pendapatan di Eks Karisidenan Madiun, rincian pengembangan sektor tiap kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

1. Kota Madiun : Sektor yang diutamakan dalam pengembangan kedepan adalah Sektor Industri Pengolahan dan kemudian juga dapat dikembangkan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.
2. Kabupaten Madiun : Sektor yang dapat dikembangkan adalah Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Pertanian ; Sektor Industri Pengolahan ; dan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.
3. Kabupaten Magetan : Sektor yang diutamakan dalam pengembangan kedepan adalah Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Kemudian juga dapat mengembangkan Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.
4. Kabupaten Ngawi : Sektor yang diutamakan dalam pengembangan kedepan adalah Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Kemudian juga dapat mengembangkan Sektor Pertambangan dan Penggalian, Sektor Industri Pengolahan, dan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.
5. Kabupaten Pacitan : Sektor yang diutamakan dalam pengembangan kedepan adalah Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Kemudian juga dapat mengembangkan Sektor Pertambangan dan Penggalian, dan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.
6. Kabupaten Ponorogo : Sektor yang dapat dikembangkan adalah Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Pertanian ; Sektor Industri Pengolahan ; dan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dalam penelitian ini dapat disimpulkan :

1. Tingkat ketimpangan pendapatan wilayah di Eks Karisidenan Madiun tergolong sedang/moderat yang dipengaruhi oleh distribusi yang kurang merata pada PDRB per kapita di setiap kabupaten/kota.
2. Sektor-sektor yang bersifat unggulan merupakan sektor-sektor yang diprioritaskan untuk dikembangkan sedangkan sektor-sektor yang bersifat andalan dan prospektif juga dapat dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan PDRB pada setiap kabupaten/kota di Eks Karisidenan Madiun. Pengembangan sektor lebih ditekankan kepada pembangunan sektor dan peningkatan iklim investasi pada sektor tersebut, untuk mengurangi ketimpangan pendapatan wilayah.

REKOMENDASI

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Pemerintah dapat memfokuskan pembangunan dan pengembangan pada kabupaten/kota Eks Karisidenan Madiun yang memiliki PDRB per kapita terendah/dibawah rata-rata.
2. Pemerintah dapat memfokuskan pembangunan pada sektor-sektor yang bersifat unggulan serta sektor-sektor andalan dan prospektif untuk mengurangi ketimpangan pendapatan wilayah.
3. Perlu dilakukan penelitian lanjutan terkait sub sektor dan komoditas terkait sektor-sektor yang diteliti untuk lebih memfokuskan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur. (2017). Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2017, Surabaya : BPS Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur. (2018). Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2018, Surabaya : BPS Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur. (2019). Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2019, Surabaya : BPS Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur. (2020). Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2020, Surabaya : BPS Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur. (2021). Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2021, Surabaya : BPS Jawa Timur.
- Baransano, Putri. (2016). Peranan Sektor Unggulan sebagai Salah Satu Faktor dalam Mengurangi Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Provinsi Papua Barat. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota (Journal of Regional and City Planning)*, vol. 27, no. 2, 119-136. Tersedia pada : <https://doi:10.5614/jrcp.2016.27.2.4>
- Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur. (2011). Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031, Surabaya :DPUCKTR Jawa Timur.
- Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur. (2016). Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031, Surabaya :DPUCKTR Jawa Timur.
- Kuncoro, Mudrajad. (2018). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Miranti, Riyanti. (2013). *Provincial Poverty in Indonesia 2006-2011*. Tersedia pada : <https://www.researchgate.net/publication/258537144>
- Rachbini, Didik J, 2001. *Pembangunan Ekonomi & Sumber Daya Manusia*. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Satria, Wiratama, dkk. (2018). Analisis Pembangunan Wilayah Tertinggal di Provinsi Jawa Timur. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, vol. 05, no. 01, 16-20. Tersedia pada : <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/eJBAUJ/article/view/7726/5461>
- Sjafrizal. (2012). *Ekonomi Wilayah Dan Perkotaan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Tarigan, Robinson. (2005). *Ekonomi Regional*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Todaro, P. Michael and Stephen C. Smith. (2009). *Economic Development*. New York. New York University.

Widodo, Tri. 2006. Perencanaan Pembangunan. Yogyakarta: UPP STIM YKP